

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2018 DAN NOMOR 56 TAHUN 2019**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2018	PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019	TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Urmun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019;</p>	<p>a. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai antara Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 dengan terjadinya pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja dan page kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5.8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarrnasin Tahun 2016-2021);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nornor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Kota Banjarrnsin Tahun 2016 2021(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nornor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);</p> <p>13.</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40)</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019.	PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarrnsin. 4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. 6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarrnsin. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadam Kebakaran Serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 	<p>Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 35) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>13. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.</p> <p>14. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.</p>	<p>Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 35) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH</p>	<p>BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH</p>
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
<p>1. RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari hasil Musrenbang, dengan mengacu RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 3</p>	<p>Pasal 3A</p>
<p>1. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan raju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu insentif yang bersumber dari APED, sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :</p> <p>a. Acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), berupa program/ kegiatan SKPD dan lintas SKPO;</p> <p>b. Landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APED Tahun 2019.</p> <p>c. Bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.</p>	<p>1. Perubahan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.</p> <p>2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.</p> <p>3. Sistematika RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari 6 (enam) bagian utama, yaitu :</p> <p>a. Bab I. Pendahuluan</p> <p>b. Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan</p> <p>c. Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah</p> <p>d. Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>e. Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>f. Bab VI. Penutup</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4</p>
<p>1. SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 danj atau APBD Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>tetap</p>

<p>2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.</p> <p>3. Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan</p>	tetap
Pasal 5	Pasal 5
<p>1. Dalam hal RKPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dahl atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila 'belum termuat dalam lampiran Peraturan Walikota ini.</p> <p>2. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :</p> <p>a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;</p> <p>b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/ atau;</p> <p>c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Penambahan danjatau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	tetap
BAB III KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 6	Pasal II
<p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.</p>	<p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.</p>
<p>Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Juni 2018</p> <p>WALIKOTA BANJARMASIN, Ttd H.IBNU SINA</p>	<p>Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2022</p> <p>WALIKOTA BANJARMASIN, Ttd Ttd H.IBNU SINA</p>
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018	BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN 2019